

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah Kabupaten yang berada di ujung barat daya Provinsi Aceh, Indonesia. Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari kabupaten ini adalah Kepulauan Banyak. Singkil merupakan Ibu Kota Kabupaten ini.

Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, kecamatan Singkil yang sering mengalami terjadinya bencana alam. Karena, Kecamatan singkil berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan sering terjadinya bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya diakibatkan oleh kapasitas curah hujan yang sangat tinggi, pendangkalan sungai, dan terjadinya perubahan fungsi lahan tanpa system tata kelola yang baik yang memperhatikan kapasitas DAS dalam menampung air.

Selain berada di kawasan aliran sungai. Kecamatan singkil juga memiliki tingkat kompleksitas hidro metereologis yang cukup tinggi. Sehingga menyebabkan Kecamatan Singkil mengalami hamper semua jenis bencana hidro metereologis seperti banjir, abrasi dan sedimentasi selain bencana yang disebabkan oleh fenomena alam, bencana juga dapat disebabkan oleh perilaku manusia antara lain karena kelalaian, ketidaktahuan maupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat.

Bencana alam tidak dapat diperkirakan kapan dan dimana terjadinya, oleh karena itu kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam sangat penting dan harus menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana. Pemerintah bertanggung jawab dalam menangani dan menanggulangi bencana seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Mengelola bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan cara mendadak, tetapi harus dilakukan secara terencana dengan manajemen yang baik, jauh sebelum suatu bencana terjadi melalui suatu proses yang disebut manajemen bencana. Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Mulai dari persiapan peralatan untuk mendeteksi terjadinya bencana misalnya pada bencana alam, dipersiapkan dengan uji coba, pembuatan jenis bangunan yang tahan dengan gempa, pengelolaan tata kota dan kesadaran warga masyarakat untuk menanggulangi bencana alam ataupun pemeliharaan daerah hulu sungai dan pegunungan serta hutan untuk mencegah terjadinya tanah longsor.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang rawan terhadap bencana. Hal itu disebabkan karena kondisi geologi dan geografi Aceh berada di jalur cincin api (*ring of fire*) yang menyebabkan beberapa gunung api, dan *zona* subduksi menjadi pusat gempa bumi dan tsunami. Dari sisi hidrometeorologi, Aceh juga rentan terhadap banjir bandang, longsor, banjir luapan, dan kekeringan. Sederet fenomena alam ini, telah menjadikan masyarakat Aceh akrab dengan berbagai bencana yang datang silih berganti.

Termasuk bencana banjir adalah bencana yang paling sering terjadi di wilayah Aceh (Dikutip dari Kepala Dinas Sosial Aceh dalam AJNN.net 2020).

Ada 14 kabupaten di Provinsi Aceh rawan bencana alam, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Termasuk di antaranya adalah Kabupaten Aceh Singkil yang termasuk daerah rawan bencana khususnya banjir. Aceh Singkil sendiri merupakan salah satu kabupaten tertinggal dan termiskin di Provinsi Aceh yang ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. (Hanafiah, 2016. Mongabay).

Sebagai salah satu Kabupaten di Aceh yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir, Aceh Singkil telah membentuk lembaga yang berfokus langsung kepada penanggulangan bencana yang terjadi, yaitu Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD). BPBD Kabupaten Aceh Singkil adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas kebijakan dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. BPBD bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Komunikasi pengurangan resiko bencana dapat efektif apabila pemerintah menerapkan manajemen penanggulangan bencana yang partisipatif dengan mengerahkan berbagai struktur masyarakat dan lembaga penyiaran yang ada. Melalui kerjasama tersebut kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana akan efektif dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal yang tersedia sehingga masyarakat tidak hanya dilihat sebagai objek penanggulangan bencana tetapi mereka juga sebagai subjek yang bertanggung jawab atas keamanan masyarakat dari berbagai bencana. (bnpb.go.id)

Ada beberapa kebijakan serta upaya yang dilakukan oleh BPBD Aceh Singkil dalam menanggulangi dan mengurangi resiko bencana banjir tersebut. Seperti kontijensi penanggulangan bencana banjir, membangun jalan mitigasi bencana, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan desa tangguh bencana, bahkan telah membentuk tim reaksi cepat tanggap di setiap kecamatan-kecamatan di Aceh Singkil. Namun pada penelitian ini, peneliti berfokus kepada satu kebijakan, yaitu kebijakan kontijensi penanggulangan bencana banjir.

Perencanaan kontijensi didefinisikan sebagai proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu dimana skenario dan tujuan disetujui, tindakan manajerial dan teknis ditentukan, dan sistem untuk menanggapi kejadian disusun agar dapat mencegah, atau mengatasi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi. Kontijensi merupakan bagian dari komunikasi kebijakan, karena kontijensi memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan norma-norma pada komunikasi kebijakan yaitu berencana meminimalisir terjadinya kerugian yang disebabkan oleh bencana yang terjadi di setiap daerah.

Kontijensi juga merupakan bagian dari kebijakan komunikasi *non-media*, hal itu dibuktikan dari penerapan kebijakan kontijensi yang tidak menggunakan media, tetapi lebih membutuhkan diskusi dari sumber daya manusia yang ada. Karena rencana kontijensi disusun berdasarkan perkiraan situasi (asumsi-asumsi) analisis kebutuhan yang disepakati. Dengan kata lain, rencana kontijensi disusun secara bersama-sama oleh berbagai pihak, unsur, dan komponen masyarakat.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya kesiapsiagaan oleh semua pihak karena penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat dimana pemerintah sebagai penanggung-jawab utamanya. Masing-masing pihak atau pelaku dapat berperan aktif sesuai dengan kemampuan, keahlian, kompetensi dan kewenangannya serta menyumbangkan atau menggunakan sumberdaya yang ada dalam lingkup kekuasaan atau kewenangannya. (Kabupaten Aceh Singkil, 2021).

Permasalahan yang diangkat serta alasan dibuatnya kebijakan kontijensi dikarenakan terjadinya serangkaian bencana banjir dalam rentan waktu yang setiap tahunnya terjadi. Karena letak geografis yang menyebabkan Aceh Singkil mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis, sehingga mengakibatkan Aceh Singkil berpotensi terjadi bencana banjir setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diambil 5 tahun terakhir dari sumber BPBA dan juga BPBD Aceh Singkil.

Pada desember 2016 Aceh Singkil di landa bencana banjir tepatnya di Kecamatan Singkil dan Singkil Utara, hal itu menyebabkan masyarakat harus mendirikan posko dapur karena rumah mereka terendam banjir, karena hal tersebut BPBD menyuplai air bersih untuk kebutuhan posko dapur para warga. Di november 2017 Aceh Singkil kembali dilanda bencana banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm sampai dengan 70 cm sehingga mengakibatkan jalan penghubung antara Aceh Singkil dan kota Subulusalam terputus.

Di oktober 2018 beberapa desa di Kecamatan Aceh Singkil kembali terendam banjir dan yang paling parah adalah banjir di Desa Ujung bawang tepatnya dikecamatan Singkil yang mengharuskan para warga membuat jembatan darurat

sebagai penghubung antara jalan raya dengan rumahnya, ketinggian air banjir diperkirakan sampai 80 cm sampai dengan 1 meter.

Pada oktober 2019 Aceh Singkil kembali dilanda bencana banjir di Kecamatan Gunung Meriah dan Kecamatan Singkil Utara sehingga mengakibatkan rumah warga terendam, fasilitas umum terendam, persawahan dan perkebunan terendam, serta ternak ayam para warga juga ikut terendam, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian para warga.

Tahun 2020 terjadinya banjir yang diakibatkan curah hujan yang terjadi hampir setiap harinya di bulan september sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai lae cinendang sehingga menyebabkan banjir di beberapa desa yang ada di Kecamatan Simpang Kanan dengan ketinggian mencapai 1 meter.

Terakhir di tahun 2021 di bulan Mei Aceh Singkil terendam banjir yang dipicu akibat curah hujan dengan intensitas tinggi sehingga merendam rumah warga. Beberapa desa yang terdampak banjir luapan seperti Desa Bulusemma Kecamatan Suro, Desa Kampung Baru dan Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara, Desa Lae Balno dan Situban Makmur Kecamatan Danau Paris, dan beberapa desa lainnya.

Informasi mengenai kejadian fenomena banjir yang setiap tahunnya terjadi dapat dilihat dari beberapa sumber yang ada. Pertama dapat dilihat dari situs resmi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang selalu memberitakan mengenai kejadian banjir yang terjadi diseluruh kabupaten yang ada di Aceh khususnya di Aceh Singkil. Kedua dapat dilihat melalui pemberitaan-pemberitaan di berbagai media yang ada, khususnya media lokal di Aceh seperti Serambi, Antara, Kompas.com dan masih banyak lagi.

Media-media tersebut juga sudah terverifikasi oleh Dewan Pers sehingga pemberitaan yang disajikan sudah teruji kebenarannya. Terakhir dapat dilihat melalui akun *facebook* resmi milik BPBD Aceh Singkil yang selalu memberitakan mengenai kejadian banjir yang terjadi di Aceh Singkil mulai dari dibentuknya Dinas BPBD yaitu di tahun 2013 sampai dengan saat ini.

Kejadian banjir yang setiap tahunnya terjadi tidak pernah memakan korban jiwa tetapi dampak yang ditimbulkan cukup besar seperti terendahnya rumah para

warga, terendamnya fasilitas-fasilitas umum, terendamnya persawahan dan lahan perkebunan milik masyarakat, dan terhentinya aktivitas rutin seperti sekolah dan bekerja dikarenakan jalan penghubung yang terendam banjir. Sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian dibidang ekonomi dan material. Berbagai upaya serta kebijakan dari BPBD maupun pemerintah telah dilakukan, namun belum sepenuhnya mampu untuk menanggulangi bencana banjir tersebut secara efektif.

Maka dari itu sangat dibutuhkan komunikasi kebijakan yang benar-benar mencakup dan sampai kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya agar dapat ikut andil dalam penanggulangan bencana banjir. Untuk itu, Aceh Singkil membutuhkan upaya-upaya penanggulangan bencana yang dititik beratkan pada situasi terdapat bencana yang salah satunya adalah perencanaan kontijensi bencana banjir. Perencanaan kontijensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP 21/2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan yang menghasilkan dokumen rencana kontijensi.

Setelah dibahas mengenai kontijensi penanggulangan bencana banjir, selanjutnya akan dilakukan evaluasi kebijakan. Yaitu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. (Widodo, 2008).

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Komunikasi
2. BPBD Aceh Singkil
3. Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Singkil

## **1.3 Rumusan Masalah**

Bagaimana kebijakan komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengurangan resiko bencana banjir di Aceh Singkil tahun 2024 ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kebijakan komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengurangan risiko bencana banjir di Aceh Singkil.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### 1.5.1 Manfaat secara teoritis :

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kebijakan komunikasi dan untuk konsentrasi humas diharapkan dapat bermanfaat terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam.

##### 1.5.2 Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan perkembangan ilmu komunikasi serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang tertarik dengan penelitian yang berhubungan dengan strategi peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam khususnya banjir.